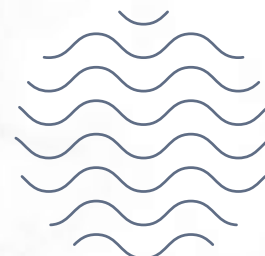


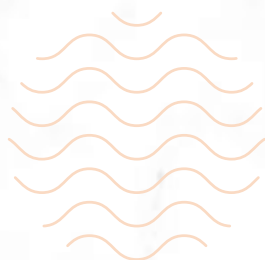


PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

**RENCANA KERJA
REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**



**20
23**



**RENCANA KERJA
REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**20
23**



**PEMERINTAH
KOTA BANDUNG**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024 sebagai Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung 2020–2024 dapat diselesaikan penyusunannya.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja yaitu sebagai landasan operasional Tim Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil sehingga dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang berbasis kinerja dengan membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung 2020–2024 tercakup dalam Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Reformasi Birokrasi (RB) General terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan Utama serta 26 (Dua Puluh Enam) Indikator berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB) dapat tercapai sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi (RB) setelah penajaman.

Reformasi Birokrasi (RB) Tematik terdiri dari 5 (lima) tema yang merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024.

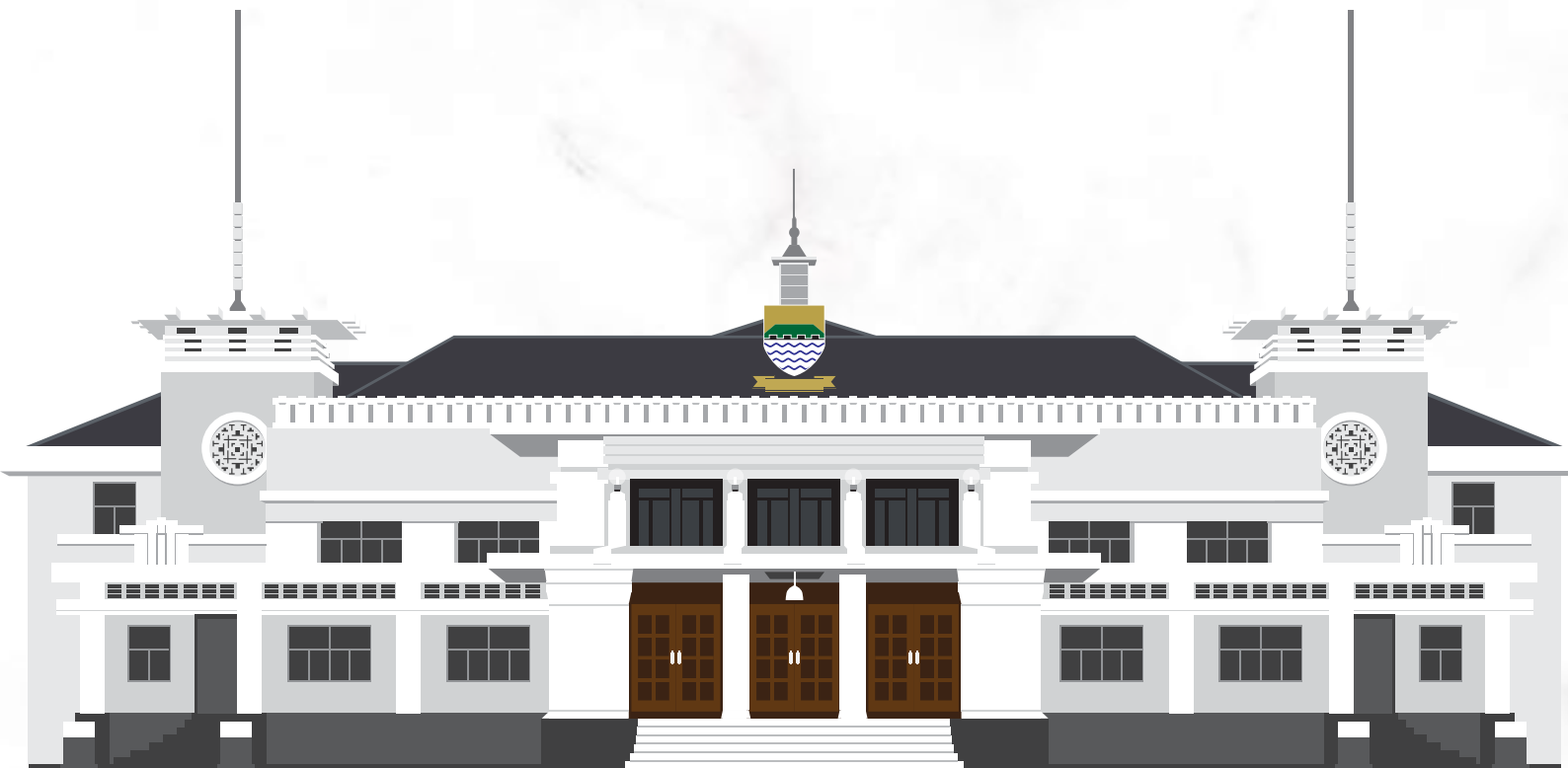
Bandung,
Pj Wali Kota Bandung

TTD

Bambang Tirtoyuliono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	8
A. PENDAHULUAN	11
B. MAKSUD DAN TUJUAN	27
C. SASARAN	27
D. RENCANA AKSI	29
E. PELAKSANAAN RENCANA AKSI	75
F. PENUTUP	78





DAFTAR TABEL

Tabel 1	Reformasi Birokrasi General	22
Tabel 2	Reformasi Birokrasi Tematik	24
Tabel 3	Tujuan dan Sasaran	28
Tabel 4	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General	30
Tabel 5	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik	51
Tabel 6	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	75
Tabel 7	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik	77
Tabel 8	Capaian Kinerja	78

DAFTAR GRAFIS

Grafis 1	Reformasi Birokrasi	13
Grafis 2	Tahapan Pembangunan RB General	14
Grafis 3	Tahapan Pembangunan RB Tematik	14
Grafis 4	Lima Tema Tematik	15
Grafis 5	Lima Faktor Penetapan Tema	16
Grafis 6	Fokus Intervensi Harus Berciri	17
Grafis 7	Penetapan Kinerja	17
Grafis 8	Kunci Keberhasilan Pelaksanaan RB Tematik	19





A. Pendahuluan

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 yang merupakan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang Reformasi Birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya dan seiring dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMMDP) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Maka untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut. Sejalan dengan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.





Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan.

Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi (RB) berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu;

- a. mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil,
- b. birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat,
- c. serta birokrasi yang lincah dan cepat.

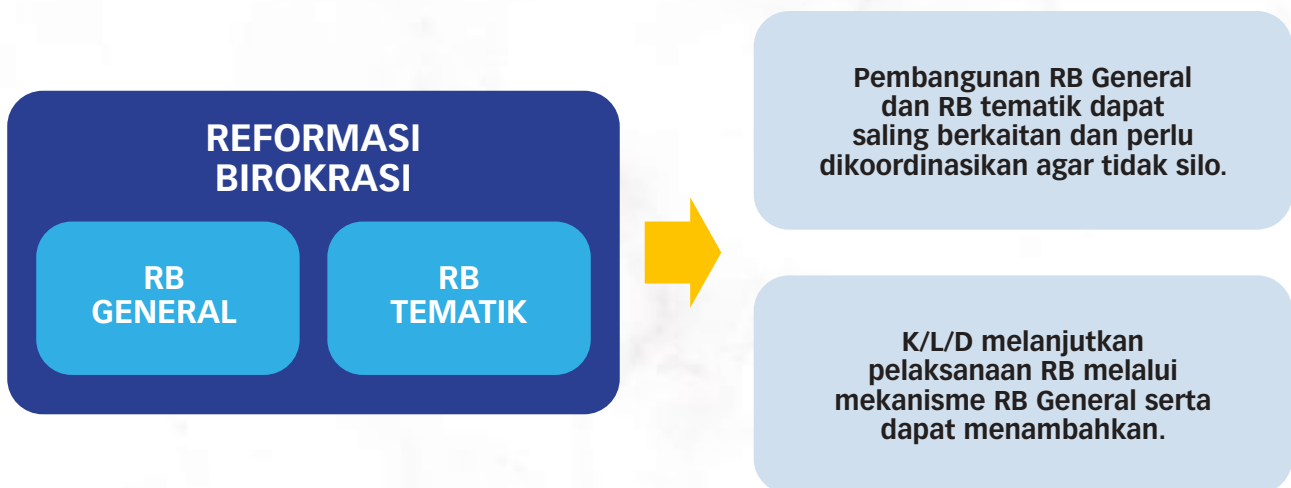
Tujuan mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian Pembangunan Nasional. Sebagai salah satu agenda nasional, Reformasi Birokrasi (RB) didesain untuk membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) atau yang disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan untuk menjawab kendala berupa :

1. Adanya perubahan terhadap Road Map Reformasi Birokrasi (RB)
Perubahan tersebut memiliki fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi (RB). K/L/D dimandatkan untuk segera menindaklanjuti perubahan tersebut dan belum memiliki pedoman dalam pelaksanaannya

2. Masih adanya tata kelola pada K/L/D yang belum memiliki kualitas tinggi dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kualitas tata kelola pada K/L/D yang belum baik dapat menghambat pencapaian dampak Reformasi Birokrasi (RB) yang diharapkan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
3. Pemahaman K/L/D dalam pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) belum seragam. Persepsi yang berbeda antar K/L/D menyebabkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang berbeda-beda.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) masih dilakukan parsial dan belum berfokus pada isu strategis nasional maupun arah Pembangunan Nasional Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) cenderung berjalan masing-masing sehingga belum efektif mendorong hasil pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) yang diharapkan secara nasional. Program Reformasi Birokrasi (RB) tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada level mikro mengacu pada kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada Road Map Reformasi Birokrasi (RB) dengan penajaman yang mengarahkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) ke dalam dua fokus, yaitu Reformasi Birokrasi (RB) General dan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.



Secara ringkas terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB), baik Reformasi Birokrasi (RB) General maupun Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Tahapan tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Tahapan Pembangunan RB General

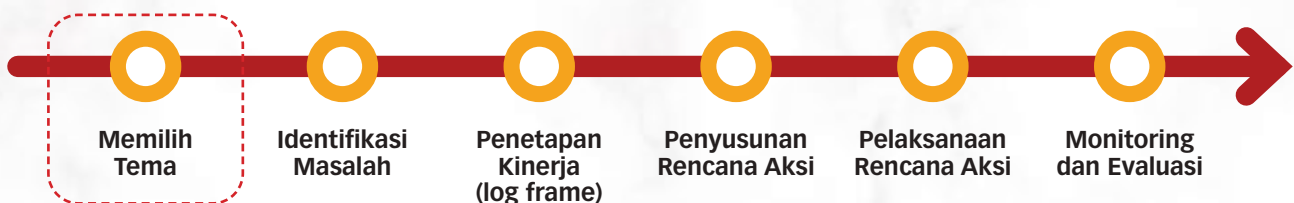
Penyusunan RMRB



Reformasi Birokrasi (RB) General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB) dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi (RB) setelah penajaman. Untuk mewujudkan hal tersebut di level mikro, terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal

Tahapan Pembangunan RB Tematik

Penyusunan RMRB



Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program-kegiatan yang sifatnya problem solving-debottlenecking dalam tata kelola pemerintah.

Tahapan RB Tematik terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Menetapkan Tema

Langkah awal dalam kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun berjalan. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan untuk

memilih satu atau lebih dari empat tema yang akan diangkat sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik. Dalam menetapkan tema, instansi pemerintah perlu berangkat dari evidence berupa data yang kuat dan relevan (evidence based policy). Data merupakan komponen penting pada tahap ini karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tema. Data yang digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.

Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja existing. Setelah melakukan identifikasi terhadap kinerja yang diinginkan dengan kinerja existing yang ada, maka selanjutnya adalah memperhatikan gap yang muncul dari kedua kinerja/kondisi tersebut. Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara kinerja yang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut.

Tema dipilih dari 5 (lima) Tema Tematik yang telah ditetapkan yaitu:



**Penanggulangan
Kemiskinan**



**Peningkatan
Investasi**



**Digitalisasi
Pemerintahan**

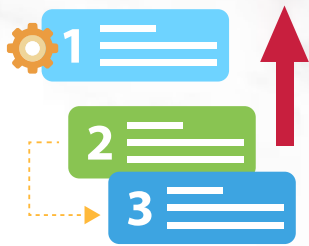


**Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (PDN)**



**Pengendalian
Inflasi**

Penetapan tema harus didasarkan dengan mempertimbangkan lima faktor berikut:



**Faktor Kesesuaian
dengan Prioritas K/L/D**



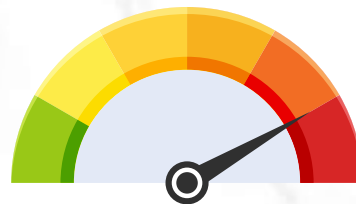
**Keparahan
Masalah**



**Dampak Terhadap Ekonomi/
Kesejahteraan Masyarakat**



**Potensi
yang Dimiliki**



**Percepatan
Kinerja**

K/L/D dapat memilih tema yang akan diambil berdasarkan hasil analisis atas data yang ada. Dalam memilih tema, instansi pemerintah setidaknya perlu mempertimbangkan lima faktor atau kriteria berikut:

a. Faktor kesesuaian dengan Prioritas K/L/D

Faktor kesesuaian diartikan sebagai upaya K/L/D untuk menemukan kesesuaian tema yang dipilih berdasar kondisi prioritas dan data eksisting yang dimiliki K/L/D. Sebagai contoh, untuk Daerah dapat menemukan kesesuaian dengan meninjau prioritas pembangunan daerah atau tupoksi utama instansi yang ada pada dokumen RPJMD/RPJPD. Artinya suatu tema menjadi masalah khusus dan memperoleh perhatian sehingga dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan K/L/D.

b. Faktor keparahan masalah

Urgensi penyelesaian masalah yang menjadi tupoksi K/L/D menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan tema RB Tematik. Artinya bahwa tema yang dipilih dianggap telah mencapai tahap yang krisis dan tidak dapat diabaikan.

c. Faktor dampak terhadap ekonomi/kesejahteraan Masyarakat

Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama penentu pemilihan tema RB Tematik. Hal ini dikarenakan, apabila tema tersebut tidak dipilih maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak negatif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila tema itu dipilih, maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak positif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan Masyarakat

d. Faktor potensi

Faktor lain yang juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan tema adalah adanya potensi yang dimiliki K/L/D. Artinya bahwa tema yang dipilih didasarkan pada aset kekayaan yang dimiliki daerah atau instansi yang dapat di jadikan sebagai sarana pembangunan.

e. Faktor percepatankinerja

Percepatan Kinerja K/ L /D dalam pelaksanaan pembangunan RB menjadi faktor utama lainnya dalam pemilihan tema RB Tematik. Artinya bahwa ketika ditemukan kondisi yang tidak signifikan negatif pada data yang ada, maka instansi dapat memilih tema yang masih memerlukan percepatan intervensi agar memperoleh hasil kinerja yang lebih optimal.



2. Identifikasi Masalah (Bottleneck)

Setelah instansi pemerintah menetapkan tematik yang menjadi fokus, langkah selanjutnya perlu mengidentifikasi dan mengurai akar masalah yang terkait tata kelola pada isu/program prioritas pemerintah. Identifikasi permasalahan menjadi krusial karena seringkali kebijakan yang dibuat tidak menyentuh secara langsung akar permasalahan. Pada akhirnya hal ini seringkali mengakibatkan permasalahan yang sama terjadi berulang karena tidak terselesaikan secara tuntas. Setelah melakukan identifikasi masalah, maka perlu menetapkan fokus intervensi. Dalam hal ini fokus intervensi merupakan aspek yang akan mendapatkan intervensi dalam kegiatan RB Tematik. Hasil dari identifikasi permasalahan yang dianggap memiliki skala potensi paling tinggi, dijadikan sebagai dasar untuk menentukan fokus intervensi. Penetapan fokus intervensi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti fishbone analysis, metode critical success factor, matrix action priority, dan metode lainnya. Pada contoh berikut metode lainnya yang dapat

digunakan adalah matriks Eisenhower. Matriks ini dapat membantu mengatur dan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi (urgency) dan kepentingan (importance).

Fokus Intervensi Harus Berciri

- Berdampak, penetapan fokus intervensi merupakan pilihan yang paling berdampak baik pada keseluruhan proses bisnis maupun pada masyarakat secara langsung.
- Hasil dapat dirasakan secara cepat.
- Memiliki urgensi tinggi, penetapan fokus intervensi adalah yang paling memiliki urgensi tinggi dan perlu untuk segera diintervensi. Sebagaimana pemilihan tema, maka pemilihan fokus intervensi harus merupakan alternatif pilihan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan memberikan dampak negatif.

3. Penetapan Kinerja/ Log Frame

Langkah selanjutnya dalam kerangka perencanaan reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah perlu menyusun kerangka logis berdasarkan fokus intervensi yang telah ditetapkan.

Penetapan Kinerja

Identifikasi Masalah (Bottleneck)

- Mencari akar permasalahan dari suatu tema
- Dapat menggunakan teknik 5Whys, root cause, Fishbone, dsb

Identifikasi permasalahan berfokus pada tata kelola pemerintahan (baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga solusi yang ditentukan adalah terkait dengan tata kelola pemerintahan).

Menetapkan Fokus Intervensi

- Berdampak
- Hasil dapat dirasakan secara langsung
- Memiliki urgensi tinggi

Menyusun Kerangka Logis

- Berdasarkan fokus intervensi yang telah ditentukan
- Dapat menggunakan berbagai tools, salah satunya menggunakan CSF

Pada fase ini dilakukan identifikasi secara holistik terhadap kinerja yang diinginkan akan diwujudkan pada setiap jenjang tingkatan dari RB Tematik. Langkah identifikasi dimulai dengan menyusun kerangka logis kinerja atas program Tematik secara lengkap, dari tingkat final outcome sampai pada input atau sumberdaya yang akan digunakan. Pelaksanaan identifikasi dilakukan oleh koordinator program tematik berkolaborasi dengan instansi terkait. Dalam penyusunan kerangka logis kinerja RB Tematik, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Menetapkan Final Outcome dengan dilengkapi indikator kinerja dan penetapan besarnya target yang akan dicapai dari indikator kinerja tersebut.
- Final outcome yang telah ditetapkan, dijabarkan ke dalam intermediate outcome dengan dilengkapi indikator kinerja dan penetapan besarnya target yang akan dicapai. Dalam penjabaran kinerja harus mempertimbangkan hubungan kausalitas dan keselarasan sinergitas antar jenjang kinerja.
- Masing-masing intermediate outcome dijabarkan ke dalam immediate outcome sampai pada tingkat input sumberdaya yang diperlukan.
- Dengan disusunnya kerangka logis kinerja, maka akan terlihat adanya hubungan sebab akibat (causality) dan keselarasan (alignment) yang jelas antara setiap jenjang kinerja yang akan dicapai. Penyusunan kerangka logis dapat digunakan untuk mencegah ketidaksiharasan antar kegiatan yang dilaksanakan dengan outcomes yang akan dicapai, serta memudahkan dalam melakukan analisis keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Secara umum, panduan untuk penyusunan kerangka logis dapat mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.



4. Penyusunan Rencana Aksi

Setelah instansi pemerintah telah memiliki kerangka logis kinerja, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun aksi yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Aktivitas utama yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah utama adalah dengan penetapan rencana aksi yang didasarkan pada logical framework yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Penyusunan rencana aksi disertai dengan rumusan output, indikator, target waktu penyelesaian, serta menetapkan instansi yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan pelaksana dari pencapaian setiap rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan rencana aksi menjadi penting sebab rencana aksi akan memecah proses mencapai tujuan menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan agar menjadi lebih jelas. Pada rencana aksi ini, akan tergambar dengan lebih jelas dari hulu ke hilir (keseluruhan proses bisnis) siapa mengerjakan apa dengan target waktu penyelesaian yang jelas pula.

Pelaksanaan penyusunan dilakukan oleh koordinator program tematik bersama instansi terkait. Secara lengkap konten rencana aksi tematik dapat dilihat dari gambar format rencana aksi RB Tematik, yaitu: permasalahan, aksi perbaikan, output, indikator, target waktu penyelesaian, instansi yang bertanggung jawab sebagai koordinator, dan pelaksana aksi perbaikan.

5. Pelaksanaan RB Tematik

Pada pelaksanaan RB Mikro, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehinggapelaksanaan RB Mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara general dan tematik (tidak silo).

Adapun kunci keberhasilan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

Komitmen
Pimpinan dan seluruh anggota

Menyelesaikan Akar Masalah
Bukan fokus hanya pada masalah tapi akar masalah

Kolaborasi
Lintas unit kerja, pusat K/L/D maupun stakeholders

Inovatif
Out of the box, bukan business as usual



6. Monitoring Evaluasi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) RB Tematik

Monitoring dan Evaluasi RATL dilakukan berdasarkan Dokumen Rencana Aksi RB Tematik. Periode Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga Monev RB Mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara General dan Tematik (tidak silo). Hal lebih lanjut akan diatur dalam Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 061/Kep.828-Bagor/2023 tentang Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2025, bahwa dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Reformasi Birokrasi General dengan 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama dan 26 (dua puluh enam) Indikator mandatori serta Reformasi Birokrasi Tematik dengan 5 (lima) tema sebagai berikut :

a. Reformasi Birokrasi General

Dalam Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan pada Kegiatan Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata Kelola internal pada instansi pemerintah. Perbaikan tersebut dilakukan dengan 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama dan 26 (dua puluh enam) Indikator yang menjadi mandatori sebagai berikut :

Reformasi Birokrasi General

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
	Nilai SAKIP :	
	Perencanaan Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
	Pengukuran Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
	Pelaporan Kinerja	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Evaluasi Kinerja	Inspektorat
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Inspektorat
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektorat
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Employeer Branding*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Indeks Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.

b. Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan dalam rangka :

- Mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat .
- Menunjukkan kontribusi Reformasi Birokrasi secara langsung terhadap program prioritas pembangunan nasional.
- Mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat.

Keberhasilan Pelaksanaan RB Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara kinerja yang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai dalam RB Tematik.

Tema dipilih dari 5 Tema Tematik yang telah ditetapkan yaitu:

Reformasi Birokrasi Tematik

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	LEADING SECTOR
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital dalam Penanganan Stunting	Prevalensi Stunting (Persentase Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tim P3DN)

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung terdiri atas:

- a. Pengarah Tim Reformasi Birokrasi dengan susunan sebagai berikut :
 - Pengarah :
Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - Penanggungjawab :
Sekretaris Daerah Kota Bandung
 - Sekretaris Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi :
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung
- b. Strategic Transformation Unit (STU) merupakan unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung yang merupakan organ pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 - Ketua Strategic Transformation Unit (STU) :
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Bandung
 - Anggota :
Pejabat Struktural, Pejabat Struktural yang disetarakan, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.
- c. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (leading institution) merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengampu ketercapaian indikator kinerja pelaksanaan RB General;
 - Koordinator Penanggungjawab :
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung
 - Penanggungjawab Indikator :
Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mengampu urusan.
- d. Penanggungjawab sektor (leading sector) merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan RB Tematik;
 - Koordinator Pengampu :
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - *Leading Sector* RB Tematik
Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mengampu urusan.
- e. Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal) terkait ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, untuk dijadikan bahan tindaklanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik;
 - Ketua Tim Evaluasi Internal :
Inspektur Daerah
 - Sekretaris :
Sekretaris Inspektorat
 - Ketua Pelaksana :
Irbal Khusus

- Anggota :
Tim TPI RB General dan RB Tematik
- f. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh *Project Transformation Unit* (PTU) yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah masing – masing.

Tim RB General

- Ketua PTU :
Kepala Perangkat Daerah
- Ketua Pelaksana RB General :
Sekretaris Perangkat Daerah
- Sekretaris :
Pejabat Struktural dan atau Pejabat Fungsional yang disetarakan.
- Anggota :
Merupakan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah

Tim RB Tematik

- Ketua PTU :
Kepala Perangkat Daerah
- Ketua Pelaksana RB Tematik :
Kepala Bidang Teknis terkait Tema yang diambil
- Sekretaris :
Pejabat Struktural dan atau Pejabat Fungsional yang disetarakan.
- Anggota :
Merupakan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja yaitu sebagai landasan operasional Tim Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil sehingga dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang berbasis kinerja dengan membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.



C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran di Pemerintah Kota Bandung dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan agenda Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL			
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA	
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincuh, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%	
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:					
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%	
		- Tindakanlanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%	
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%	
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%	
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.



D. RENCANA AKSI

Rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB instansi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi pada program Pemerintah Kota Bandung telah dijabarkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan Kota Bandung yang mendukung program-program dalam Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Adapun rencana aksi tersebut sebagaimana dalam tabel berikut :



Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	<p>Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga</p> <p>Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang</p>	Dokumen	Jumlah Dokumen Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	6	-	6	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman									
			Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung									
			Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari									
			Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang									
			Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman									
			Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung									

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari									
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru Dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	86,6 %	Monitoring dan evaluasi Implementasi Sistem kerja Baru pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan sistem kerja baru	-	-	-	30	30	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah
3	Indeks SPBE	3,35 %	Tersedianya alat ukur mandiri untuk semua OPD dalam melakukan penilaian mandiri kematangan SPBE	Laporan	Jumlah perangkat Daerah yang melakukan penilaian melalui E-monev SPBE	-	-	-	1	1	Dis-kominfo	Seluruh Perangkat Daerah
4	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	3	Tersedianya Perwal / Kepwal Arsitektur SPBE Kota Bandung	Laporan	Jumlah Kebijakan yang disahkan terkait Arsitektur SPBE Kota Bandung	-	-	1	-	1	Dis-kominfo	Seluruh Perangkat Daerah
5	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Belum dilakukan Pengukuran pada Kabupaten/Kota								Bappelitbang	
6	Nilai SAKIP	23, 24	Perencanaan Kinerja									
			Isu Strategis Kota Bandung telah disesuaikan dalam dokumen rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Indikator yang sudah berorientasi hasil selanjutnya akan dilakukan penetapan berupa Peraturan Wali Kota tentang RPD dan Renstra PD Tahun 2024 2026 sesuai dengan Permendagri	Dokumen	1. Jumlah Dokumen Perwal RPD Kota Bandung Tahun 2024 2026 yang telah ditetapkan 2. Jumlah Perwal Renstra PD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024 2026	2	-	-	-	2	Bappelitbang	Bappelitbang



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Melakukan perbaikan atas rumusan tujuan/sasaran strategis PD yang belum sepenuhnya berorientasi hasil ataupun belum menjawab isu strategis dari PD, terutama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum memasukan indicator terkait penyelesaian dan responsivitas atas kasus yang terjadi dan Dinas Perhubungan yang belum memasukan sasaran maupun indicator terkait keselamatan dan keamanan pengguna jalan, maupun konektivitas	Laporan	Jumlah laporan hasil perbaikan kerangka logis kinerja pada DP3A dan Dishub	-	2	-	-	2	Bappelitbang	DP3A dan Dishub



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
		24, 48	Pengukuran Kinerja									
			Akan dilakukan reviu keselarasan dan kesesuaian pada setiap Indikator dan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra, IKU, RKT, PK, serta LKIP tingkat Kota maupun tingkat PD berdasarkan Indikator level Kota yang sudah berorientasi hasil serta dilakukan penjabaran berdasarkan logical framework yang telah disusun	Dokumen	Jumlah dokumen hasil reviu	-	-	-	1	1	Bappe- litbang dan Bagian Organi- sasi	Seluruh Perang- kat Daerah
			Meningkatkan Efektifitas dan pemanfaatan penilaian / Raport kinerja PD	Laporan	Jumlah laporan Raport Kinerja PD Berkala	-	-	1	1	2	Bappe- litbang dan Bagian Organi- sasi	Bappe- litbang dan Bagian Organi- sasi
			Melanjutkan pengembangan integrasi data aplikasi eSAKIP, MangBagja dan SIMDA meliputi data capaian IKU PD, Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan realisasi anggaran dalam rangka optimalisasi penilaian kinerja PD	Laporan	Jumlah pengembangan aplikasi Raport Kinerja serta integrasi aplikasi eSAKIP, SIMONES, ESADAYA- NA dan Mang- Bagja	-	-	2	1	3	Bappe- litbang, BPKSDM, BKAD, Bagian Organi- sasi dan Dis- kominfo	Bappe- litbang, BK- PSDM, BKAD, Dis- kominfo dan Bagian Organi- sasi

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
		11, 95	Pelaporan Kinerja									
			Persiapan Tim penyusun Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	-	-	-	1	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah
			Perumusan Sistematis									
			Pengumpulan Analisis Data Capaian Kinerja IKU Kota									
			Pengolahan dan Verifikasi Data Capaian Kinerja IKU									
			Asistensi Perangkat Daerah (unit kerja) /Penyusunan LKIP Kota									
			Penyampaian Draft LKIP Kota pada Inspektorat (untuk di reuiu)									
			Penyelarasan dan verifikasi data Akhir hasil reuiu APIP Inspektorat									
			Penandatanganan Walikota dan Penyampaian LKIP ke Kementerian PAN-RB (melalui esr.menpan.go.id)									



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
		88	Evaluasi Kinerja 1. Melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah; 2. Konsultasi ke KemenpanRB terkait Aplikasi Evaluasi AKIP dan Pedoman Teknis Evaluasi AKIP; 3. Penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah; 4. Pembuatan Sistem/Aplikasi terkait Evaluasi AKIP	Persentase	Nilai Capaian Komponen Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Bandung (AKIP)	-	-	-	20,6	20,6	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	95	Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi pelayanan MPP Kota Bandung untuk menginvestasikan pelayanan publik yang dapat diselenggarakan secara digital.	Jenis Layanan	Terseadinya pelayanan digital dari Perangkat Daerah dan instansi pelayanan MPP Kota Bandung	-	-	22	-	22	DP-MPTSP	DP-MPTSP



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH		
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TO-TAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	
			<p>Menyampaikan laporan hasil Koordinasi dan inventarisasi ke DPMPPTSP Prov. Jabar</p> <p>Melakukan pemantauan terhadap pelayanan MPP digital yang sudah diselenggarakan.</p> <p>Memfasilitasi penyelenggaraan monev pelayanan MPP Digital.</p>										
8	Tingkat Keberhasilan Pembanguan ZI		Tidak dilakukan pengusulan ZI kepada TPN di Tahun 2023 (Untuk tahun 2023 yang dilakukan ialah Monev Internal terhadap Perangkat Daerah yang sudah menyangang WBK dan WBBM)								Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	
9	Tingkat Maturitas SPIP	SPIP Terintegrasi (MR, IEPK, PK APIP)	<p>1. Menyelenggarakan Bimtek Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi bagi APIP;</p> <p>2. Melaksanakan persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;</p> <p>4. Pengusulan user admin Aplikasi SPIP Pemerintah Kota Bandung kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;</p> <p>5. Menyusun Surat Edaran kepada Perangkat Daerah terkait dengan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;</p> <p>6. Menyusun Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;</p> <p>7. Melakukan Sosialisasi Input Data dan Dokumen Eviden SPIP Pada Aplikasi Cloud Kota Bandung.</p>	Level	<p>Indikator SPIP Terintegrasi Level 3: organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan.</p> <p>SPIP: penilaian struktur dan proses pada 5 unsur SPIP yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan</p> <p>Indeks Manajemen Risiko (MRI): kualitas perencanaan kapabilitas penerapan manajemen risiko.</p> <p>Hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan</p> <p>Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pilar Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi pilar penerapan strategi pencegahan pilar penanganan kejadian korupsi</p> <p>Level Kapabilitas APIP minimal level 3</p>	-	-	-	3	3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
10	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100 %	Keputusan Wali Kota Tentang Tim Pengelola/Admin LAPOR! di Pemerintah Kota Bandung	Dokumen	Diterbitkannya Keputusan Wali Kota Tentang Tim Pengelola/Admin LAPOR! di Pemerintah Kota Bandung	1	-	-	-	1	Dis-kominfo	Seluruh Perangkat Daerah
			Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Melalui LAPOR! di Pemerintah Kota Bandung	Kegiatan	Kegiatan dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR! tersampaikan kepada seluruh OPD di Pemerintah Kota Bandung	-	1	-	-	1	Dis-kominfo	Seluruh Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan terbitnya laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan LAPOR! di Pemerintah Kota Bandung	Dokumen	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Melalui LAPOR! di Pemerintah Kota Bandung	-	-	1	-	1	Dis-kominfo	Seluruh Perangkat Daerah
			Evaluasi Pengelolaan Pengaduan melalui Aplikasi LAPOR!	Dokumen	Laporan Tahunan Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR! di Pemerintah Kota Bandung	-	-	-	1	1	Dis-kominfo	Seluruh Perangkat Daerah
11	Survei Penilaian Integritas (SPI)	76	1. Membentuk Tim Pencegahan Korupsi dan Survei Penilaian Integritas Inspektorat Daerah Kota Bandung; 2. Melakukan permintaan data populasi e-SPI kepada Perangkat Daerah terkait; 3. Menyusun Surat Edaran terkait dengan Penyebaran dan Sosialisasi Penggunaan QR-code SPI; 4. Melakukan Penyebaran dan Sosialisasi Penggunaan QR-code SPI	Nilai	Indikator Pengukuran Dampak : 8 Menu MCP, Sosialisasi, Stranas PK, Reformasi Birokrasi, ZI, WBK, WBBM, Audit dan TLHP BPK.	-	-	-	76	76	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH		
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	
12	Indeks Kualitas Kebijakan	C (50-64, 99)	Bagian Hukum sebagai Admin IKK Kota Bandung, antara lain : - Menginventarisir Produk Hukum Daerah yang terbit 3 tahun terakhir dan berlaku efektif paling singkat 1 tahun untuk diusulkan sebagai populasi ke LAN RI - Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait data enumerator - Mengirimkan data enumerator ke LAN - Melakukan pemantauan penginputan eviden oleh enumerator - Melakukan Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian IKK LAN	Persentase	Tersampainya data enumerator masing-masing perangkat daerah ke LAN RI	-	-	100	-	100	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) dan Bappeditbang	Perangkat Daerah Pengampu Penilaian IKK	
13	Indeks Reformasi Hukum	Predikat Cukup Baik (>60-70)	Memfasilitasi koordinasi Harmonisasi Peraturan Daerah	Dokumen	Terlaksananya fasilitasi koordinasi Harmonisasi Peraturan Daerah	1	1	1	1	4	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	
			Mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	Persentase	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas							Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Meningkatkan kualitas re-regulasi atau deregulasi Peraturan Daerah	Dokumen	Tercaainya kualitas re-regulasi atau deregulasi Peraturan Daerah	1	1	1	1	4	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Meningkatkan penataan Database Peraturan Perundang-undangan	Laporan	Terbangunnya JDH yang Terintegrasi dengan Portal JDIHN	-	-	-	1	1	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
14	Tingkat Digitalisasi Arsip	62,50	Pemanfaatan pengelolaan aplikasi kearsipan dinamis (Pesona Bandung/Srikandi)	Persentase	Persentase perangkat daerah dalam pemanfaatan aplikasi e-arsip dinamis terintegrasi	100	100	100	100	100	Disar-pus	Disar-pus dan PD
			Pemanfaatan pengelolaan aplikasi kearsipan statis (Alih media arsip, SIKN)	Persentase	Persentase arsip statis yang sudah dialihmediakan ke aplikasi e-arsip statis	6,25 %	12,50 %	18,75 %	25 %	25 %	Disar-pus	Disar-pus
15	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	3,90	Tersedianya dokumen Manajemen Pengelolaan Statistik Sektor yang merujuk pada Acuan Nasional maupun Internasional	Laporan	Jumlah Dokumen Pedoman Identifikasi Kebutuhan Kegiatan Statistik Sektor	-	-	1	1	2	Dis-komin-fo	Dis-komin-fo



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
16	Indeks Tata Kelola Pengadaan	78,7	Pelatihan, Pendampingan SPSE	Skor	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	19,20	-	-	-	19,20	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
			Bimtek, Usulan Diklat Sertifikasi	Skor	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	-	18,00	-	-	18,00	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
			Pemenuhan Bukti Dukung	Skor	Tingkat Kematangan UKPBJ	-	-	40,00	-	40,00	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
17	Opini BPK	WTP	Mewujudkan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	Presentase	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP, Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Kota Bandung Tepat Waktu	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Mewujudkan kepatuhan pengelolaan aset daerah	Persentase	Tingkat kepatuhan pengelolaan aset daerah dengan indikator ketercapaian Luas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN dengan dukungan pengamanan dan laporan BMD	27,23	28,00	29,00	30,00	30,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
18	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	80%	1. Pendampingan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; 2. Melakukan monitoring progres tindak lanjut melalui kegiatan pemutakhiran progres TLHP BPK; 3. Melakukan input data TLHP BPK melalui aplikasi BPK RI	Persentase	Prosentase Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	-	-	-	80	80	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
19	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	50, 10%	Profil Seluruh Jabatan Fungsional	Dokumen	Tersusunnya Profil seluruh Jabatan Fungsional	-	1	-	1	2	BK-PSDM	BK-PSDM
			Kebijakan Internal Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Draf Kebijakan	Tersusunnya Draf Kebijakan internal Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	-	-	-	1	1	BK-PSDM	BK-PSDM





NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Penyusunan Draf Kebijakan Internal Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Draf Kebijakan	Tersusunnya Draf Kebijakan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	-	-	-	1	1	BK-PSDM	BK-PSDM
			Terlaksananya Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan/ atau Dokumen Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional	-	-	1	-	1	BK-PSDM	BK-PSDM
			Terlaksananya Penilaian Kompetensi ASN Dalam Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah ASN Hasil Penilaian Kompetensi dalam Jabatan Fungsional	1	27	50	50	128	BK-PSDM	BK-PSDM

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Terfasilitasinya Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN Dalam Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah ASN Hasil Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN dalam Jabatan Fungsional	21	21	21	21	21	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
			Terlaksananya Sertifikasi ASN Dalam Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah ASN yang tersertifikasi dalam Jabatan Fungsional	-	1	21	-	22	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
			Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Teknis ASN Dalam Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah Hasil Pengembangan Kompetensi ASN dalam Jabatan Fungsional	-	65	-	30	95	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
20	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	70,8	Tersedianya Layanan Assessment Centre	Orang	Jumlah ASN yang terlayani assessment centre	71	120	120	121	432	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
			Tersusunnya Profil Pegawai melalui simpeg-adm yang terdiri dari Penilaian Potensial (Uji Potensi, Uji Kompetensi, Rekam Jejak) dan Penilaian Kinerja	Orang	Jumlah Profil Pegawai yang tersusun	71	120	120	121	432	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
			Terlaksananya Pemilihan ASN Berprestasi	Orang	Jumlah ASN Berprestasi	-	-	-	9	9	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
21	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	100 %	Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai disusun sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022	Draft Perwal	Jumlah draft Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	1	1	BK-PSDM	BK-PSDM



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Penerapan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 pada Sistem Mang Bagja (Manajemen Bandung Kinerja)	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 pada Sistem Mang Bagja (Manajemen Bandung Kinerja)	-	1	1	1	3	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
			Tersedianya Penilaian Kinerja Periodik Pegawai Sesuai Formulasi Penilaian Kinerja Yang Berlaku	Orang	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Hasil Penilaian Kinerja Sesuai Formulasi Yang Berlaku	68 32	68 32	68 32	68 32	68 32	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
			Tersosialisasikan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepada Seluruh ASN Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022	63	-	-	-	63	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
			Asistensi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilaksanakan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Asistensi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022	1	-	-	-	1	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemerintah Kota Bandung
			Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tersusun Sesuai Kaidah yang berlaku	Dokumen	Jumlah dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan SKP sesuai kaidah yang berlaku	-	-	1	-	1	BK-PSDM	BK-PSDM



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Terbangunnya Fitur Pengelolaan Tim Kerja Pada Aplikasi Mang Bagja sesuai PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2022	Fitur	Jumlah Fitur Pengelolaan Tim Kerja Pada Aplikasi Mang Bagja	1	-	-	-	1	BK-PSDM	BK-PSDM
			Tersusunnya Laporan penilaian kinerja pegawai pada seluruh Perangkat Daerah setiap bulan	Dokumen	Jumlah laporan penilaian kinerja pegawai pada seluruh Perangkat Daerah setiap bulan	3	3	3	3	12	BK-PSDM	BK-PSDM
22	Indeks Sistem Merit	369	Menyempurnakan rencana pemenuhan kebutuhan melalui berbagai jalur pengadaan	Dokumen	Tersusunnya penyempurnaan rencana pemenuhan kebutuhan melalui berbagai jalur pengadaan	-	-	-	1	1	BK-PSDM	BK-PSDM

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Mengakselerasi penyusunan talent pool untuk seluruh pegawai serta rencana suksesi yang disusun berdasarkan target dan/atau jabatan Kritis dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020	Dokumen	Ter-susunnya talent pool untuk seluruh pegawai dan rencana suksesi berdasarkan jabatan kritis dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020	-	2	2	-	4	BK-PSDM	BK-PSDM
			Menyusun Draft kebijakan internal tentang Manajemen Karier dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2021	Dokumen	Ter-susunnya draf kebijakan tentang Manajemen Karier berpedoman pada Permenpan RB nomor 22 Tahun 2021	-	-	-	1	1	BK-PSDM	BK-PSDM
			Menyusun dan melaksanakan strategi penyelesaian atas permasalahan kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi	Laporan	Terlaksananya strategi penyelesaian atas permasalahan kinerja pegawai	1	1	1	1	4	BK-PSDM	BK-PSDM
			Mengakselerasi penyusunan kebijakan internal tentang perlindungan dan/atau bantuan kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Draft Kebijakan	Ter-susunnya draf kebijakan tentang perlindungan dan/atau bantuan kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	-	-	-	1	1	BK-PSDM	BK-PSDM



NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
			Membangun dan/atau memanfaatkan sistem penilaian kompetensi pegawai/assessment center untuk melakukan penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai	Laporan	Terlaksananya Penilaian kompetensi melalui sistem penilaian kompetensi pegawai/assessment center	-	-	1	1	2	BK-PSDM	BK-PSDM
23	Indeks Berakhlak	62,9	Melakukan Internalisasi Core Values ASN	Kegiatan	Terlaksananya internalisasi Core Values ASN	-	-	1	1	2	BK-PSDM	BK-PSDM
			Pelatihan Core Values ASN melalui Bandung Learning Center (BLC) untuk seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Orang	Jumlah ASN yang telah mengikuti pelatihan Core Values ASN melalui BLC	311	1708	3830	1500	7349	BK-PSDM	Seluruh ASN di Pemkot Bandung
24	Employeer Branding	7,5	Melakukan Sosialisasi/Internalisasi Employee Branding	Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi/ Internalisasi Employee Branding	-	-	1	-	1	BK-PSDM	BK-PSDM

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH	
				SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
25	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	Terevaluasinya Pelaksanaan Penilaian SKM Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Bandung	Nilai	Capaian Nilai IKM di Perangkat Daerah/ Unit Kerja	-	-	-	60	60	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah
26	Indeks Pelayanan Publik	4,62	Terevaluasinya Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di Perangkat Daerah berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan	Nilai	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	60	60	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.



Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)	<p>1. Strategi Penanganan : Tata Kelola Pengentasan Kemiskinan</p> <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen Perubahan Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2023 Dokumen Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Tahunan Dokumen Hasil Monev berkala pengentasan kemiskinan Jumlah aplikasi /dashboard data pengentasan kemiskinan Jumlah dokumen pendataan fakir miskin Laporan hasil sinkronisasi/validasi kesesuaian data kemiskinan Penetapan dokumen rancangan keputusan Wali Kota tentang TKPK dan RPKD <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pengentasan Kemiskinan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Tahunan Melaksanakan Monev berkala pengentasan kemiskinan Pembangunan Dashboard Data pengentasan Kemiskinan Melaksanakan pendataan fakir miskin Validasi data kependudukan warga miskin Mengidentifikasi regulasi dan kebijakan pengentasan kemiskinan Melakukan revisi atas regulasi dan kebijakan yang telah diidentifikasi sebelumnya <p>2. Strategi Penanganan : Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin</p> <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan Jumlah Masyarakat miskin di daerah rentan rawan pangan terfasilitasi Cakupan warga miskin yang mengajukan dan didaftarkan jaminan Kesehatan nasionalnya Warga miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan alat bantu Persentase warga miskin mendapatkan bantuan pelayanan pemakaman <ol style="list-style-type: none"> Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personal peserta didik Jumlah perlengkapan peserta didik sekolah dasar yang tersedia

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<ul style="list-style-type: none"> i. Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personal peserta didik j. Jumlah perlengkapan peserta didik sekolah menengah pertama yang tersedia k. Jumlah warga belajar yang mengikuti proses belajar di sanggar <p>Rencana Aksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pemberian bantuan sosial kesejahteraan b. Menyediakan cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan c. Memfasilitasi pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin rentan rawan pangan d. Melaksanakan penerimaan pengajuan dan pendaftaran Jaminan kesehatan nasional warga miskin e. Melakukan pendataan dan pemberian bantuan alat bantu dan alat bantu peraga bagi penyandang disabilitas f. Melaksanakan Pelayanan Pemakaman Bebas Biaya Bagi Warga Miskin g. Melaksanakan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Sekolah Dasar h. Menyediakan Bantuan Perlengkapan Pendidikan untuk Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Sekolah Dasar i. Melaksanakan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama j. Menyediakan Bantuan Perlengkapan Pendidikan untuk Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan SMP k. Melaksanakan Bantuan Pendidikan Bagi Warga Belajar Kesetaraan di Sanggar Kegiatan Belajar



TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>3. Strategi Penanganan : Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin</p> <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Pencari Kerja Pada Tempat Kerja Temporer Jumlah calon wirausaha Yang Mengikuti Pelatihan Dan Uji Kompetensi Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan Dan Uji Kompetensi Usia 18-65 tahun, pekerjaan pekerja lepas, belum/tidak bekerja, wiraswasta dan pekerjaan lainnya Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan Dan Uji Kompetensi Usia 18-65 tahun, pekerjaan pekerja lepas belum/tidak bekerja, wiraswasta dan pekerjaan lainnya Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengikuti Magang Usia 18-25 tahun pekerjaan belum/tidak bekerja dari P3KE dan sudah DTKS Jumlah Koperasi yang Memfasilitasi Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro Warga Miskin Jumlah Pelaku Usaha Mikro Warga Miskin yang Memerlukan Pembinaan dan Fasilitas Usaha Jumlah Warga Miskin Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang perlu diberdayakan dibidang ekonomi dalam Program Terpadu P2WKSS Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang dilayani Konseling dan Edukasi Korban kekerasan terhadap Perempuan Kepala Keluarga Miskin dan Anak yang Mendapat Layanan <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan penempatan kerja temporer kepada pencari kerja Melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi bagi calon wirausaha Melaksanakan pemberian bantuan pengembangan ekonomi Masyarakat Melaksanakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Calon Tenaga Kerja Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan bagi calon wirausaha Melaksanakan Pemagangan Calon Tenaga Kerja Melaksanakan Pembinaan Koperasi yang Memfasilitasi Bantuan Usaha Bagi Warga Miskin Melaksanakan Pembinaan pelaku usaha mikro warga miskin yang Memerlukan Pembinaan dan Fasilitas Usaha

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>i. Melaksanakan pemberdayaan bidang ekonomi kepada Warga Miskin Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam Program Terpadu P2WKSS</p> <p>j. PUSPAGA (Layanan Konseling Keluarga dan Edukasi)</p> <p>k. UPTD PPA (Layanan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)</p> <p>4. Strategi Penanganan : Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan</p> <p>Indikator :</p> <p>a. Jumlah ruang kelas baru yang bertambah</p> <p>b. Jumlah ruang kelas baru yang bertambah</p> <p>c. Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang terbangun</p> <p>d. Jumlah sarana, prasarana dan utilitas Sekolah Nonformal/ kesetaraan yang terbangun</p> <p>e. Jumlah Puskesmas yang dibangun</p> <p>f. Jumlah kepala keluarga warga miskin yang terlayani pengelolaan air limbah domestik</p> <p>g. Jumlah kepala keluarga miskin yang terlayani air minum layak</p> <p>h. Jumlah rumah (milik sendiri) warga miskin yang diperbaiki</p> <p>Rencana Aksi :</p> <p>a. Bertambahnya Ruang Kelas Baru SD</p> <p>b. Bertambahnya Ruang Kelas Baru SMP</p> <p>c. Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas PAUD</p> <p>d. Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas Sekolah Nonformal/ kesetaraan</p> <p>e. Terbangunnya Puskesmas</p> <p>f. Melaksanakan pengelolaan limbah domestik</p> <p>g. Melaksanakan penyediaan air minum layak</p> <p>h. Melaksanakan perbaikan rumah (milik sendiri) warga miskin yang tidak layak huni</p>
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	<p>1. Permasalahan : Belum optimalnya promosi penanaman modal</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Cakupan Promosi Investasi</p> <p>Indikator : Persentase Potensi Bidang Usaha Penanaman Modal yang Terpromosikan</p> <p>Rencana Aksi :</p> <p>a. Meningkatkan kegiatan promosi penanaman modal</p> <p>b. Meningkatkan fasilitasi Pelaku Usaha mikro dalam kegiatan temu bisnis</p> <p>2. Permasalahan : Belum optimalnya Kepatuhan pelaku usaha mengenai ketentuan penanaman modal</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal</p>

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>Indikator : Pengetahuan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal dari kegiatan pembinaan Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap ketentuan penanaman modal Meningkatnya kegiatan pengawasan terhadap ketentuan penanaman modal Meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap standar usaha jasa pariwisata Meningkatnya tata cara pelaporan kegiatan pendirian usaha Meningkatnya Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut <p>3. Permasalahan : Belum optimalnya kebijakan terkait penanaman modal</p> <p>Sasaran : Meningkatnya ketersediaan terkait kebijakan penanaman modal</p> <p>Indikator : Rancangan kebijakan penanaman modal yang memenuhi ketentuan</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya rancangan kebijakan kemudahan penanaman modal Tersedianya rancangan kebijakan Pajak daerah dan Retribusi Daerah <p>4. Permasalahan : Belum optimalnya potensi investasi yang terpepetakan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya cakupan peta potensi investasi</p> <p>Indikator : Cakupan peta potensi investasi</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Teridentifikasinya potensi dan peluang penanaman modal Meningkatnya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, pemagangan dan wirausaha baru <p>5. Permasalahan : Optimalisasi kualitas pelayanan perizinan berusaha</p> <p>Sasaran : Optimalisasi Sistem Informasi Perijinan dan Penanaman Modal</p> <p>Indikator : Pemanfaatan Sistem Informasi</p> <p>Rencana Aksi : Meningkatnya perencanaan dan pengembangan aplikasi perizinan online</p>



TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>6. Permasalahan : Optimalisasi kualitas pelayanan perizinan berusaha</p> <p>Sasaran : Optimalisasi kinerja PTSP dan PPB</p> <p>Indikator : Nilai kinerja PTSP dan PPB</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya hasil Penilaian Kinerja Mandiri PTSP (Kelembagaan, SDM, Sarana dan Prasarana, Implementasi OSS, serta Keluaran) Meningkatnya hasil Penilaian Kinerja Mandiri PPB (Penerapan perizinan berusaha, Penyederhanaan persyaratan dasar, dan peningkatan iklim investasi)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	<p>1. Permasalahan : Belum terjaganya stabilitas Harga Pangan “Belum stabilnya harga pangan andil inflasi”</p> <p>Sasaran : Terjaganya Stabilitas Harga Pangan “Meningkatnya stabilisasi harga pangan andil inflasi”</p> <p>Indikator : Presentase penurunan komoditas harga pangan diatas HET</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya Stabilisasi kebutuhan pokok melalui koordinasi Pemerintah Pusat, daerah dan Satgas Pangan Terlaksananya Monitoring dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok Tersosialisasi Keamanan Pangan melalui Food Security pada setiap hari kerja Terselenggaranya Optimalisasi kegiatan KPSH Beras dan CPPD Terselenggaranya Bazar Murah dan Operasi Pasar Kepokmas Terwujudnya Kerjasama Antar Daerah Komoditas Pangan

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>2. Permasalahan : Belum terkelolanya data permintaan</p> <p>Sasaran : Terkelolanya Data Permintaan Dengan Baik</p> <p>Indikator : Presentase penurunan komoditas harga pangan diatas HET</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Monitoring Pendataan Distribusi LPG 3 Kg Terselenggaranya Pembinaan pelaku usaha distribusi Bapokting Terlaksananya Pembinaan Substitusi Konsumsi Pangan Pokok Terwujudnya penetapan pengaturan biaya pendidikan dasar Terselenggaranya Optimalisasi Platform digital Terlaksananya Monitoring pelaku usaha telur ayam ras, daging ayam ras dan daging sapi Terselenggaranya Pendampingan UMKM/ Wirausaha Baru Terwujudnya Penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi <p>3. Permasalahan : Kurangnya koordinasi antar Kelembagaan dan Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Produksi Cadangan Pangan Pemerintah</p> <p>Indikator : Neraca Pangan Strategis</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Integrated Farming Buruan SAE Terselenggaranya Peningkatan Produksi perikanan budidaya serta tebar benih melalui pelatihan Terlaksananya Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah <p>4. Permasalahan : Kurangnya koordinasi antar Kelembagaan dan Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran : Menguatnya Peran Kelembagaan Pengendalian Inflasi</p> <p>Indikator : Neraca Pangan Strategis</p> <p>Rencana Aksi : Terwujudnya Peningkatan Persentase Omzet Usaha Mikro</p> <p>5. Permasalahan : Belum maksimal Kerjasama Antar Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kerjasama Perdagangan Antar Daerah</p>

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>Indikator : Neraca Pangan Strategis</p> <p>Rencana Aksi : Terjalinnnya Kerjasama Antar Daerah untuk komoditas pangan strategis</p> <p>6. Permasalahan : Masih terhambatnya waktu pengiriman barang dan terganggunya kelancaran pengiriman barang.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan</p> <p>Indikator : Terukurnya waktu pengiriman barang dan kelancaran pengiriman barang.</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir Terfasilitasi NIB Se Kecamatan di Kota Bandung Terlaksananya Penataan dan Penertiban Pada-gang Kaki Lima. Terwujudnya Penurunan Titik Kemacetan. <p>7. Permasalahan : Masih terhambatnya waktu pengiriman barang dan terganggunya kelancaran pengiriman barang</p> <p>Sasaran : Rehabilitasi Pasar</p> <p>Indikator : Terukurnya waktu pengiriman barang dan kelancaran pengiriman barang.</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Rehabilitasi Pasar di Pasar Cijerah dan pasar Sadang Serang Terlaksananya Pengembangan Toko Pangan Kita di beberapa Pasar Tradisional <p>8. Permasalahan : Masih terhambatnya waktu pengiriman barang dan terganggunya kelancaran pengiriman barang</p> <p>Sasaran : Kegiatan PIPPK</p> <p>Indikator : Terukurnya waktu pengiriman barang dan kelancaran pengiriman barang.</p> <p>Rencana Aksi : Terselenggaranya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</p> <p>9. Permasalahan : Belum terwujudnya koordinasi antara TPIN, TPID Provinsi, TPID Kab/Kota</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Perbaikan Kualitas Data</p> <p>Indikator : Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</p>



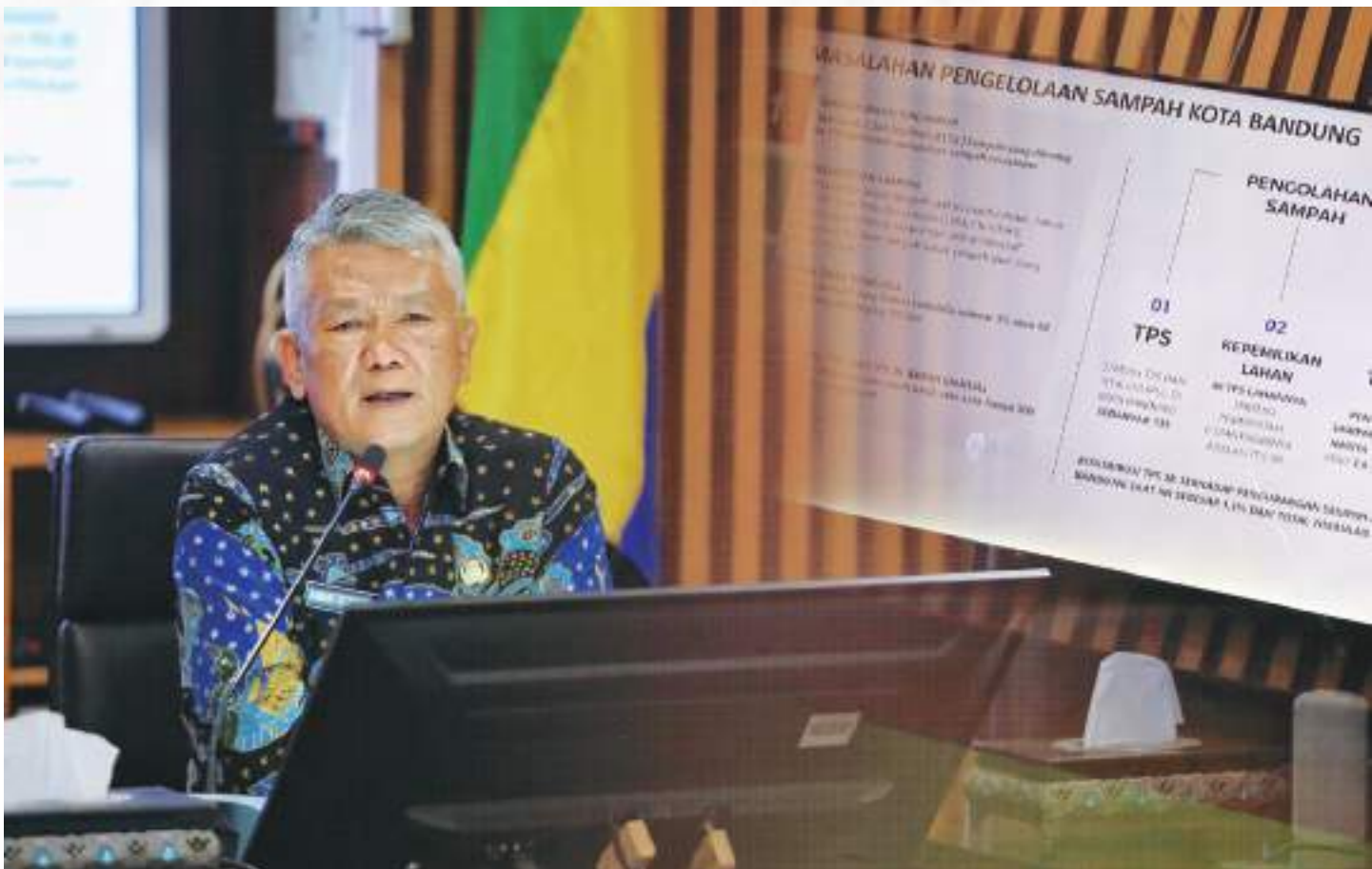
TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tercapainya Harga dan Neraca Pangan Tersedianya sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis Terwujudnya Peran aktif Kepala Daerah dalam menyampaikan informasi kondisi pangan dan isu strategis lainnya terkait pengendalian inflasi . <p>10. Permasalahan : Belum terwujudnya koordinasi antara TPIN, TPID Provinsi, TPID Kab/Kota</p> <p>Sasaran : Menguatnya koordinasi Pusat dan Daerah</p> <p>Indikator : Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Penguatan Pelaporan kegiatan Pengendalian Inflasi kepada Provinsi dan Pusat Terjalinnnya Komunikasi Harmonis dengan Instansi/Lembaga Terselenggaranya Rapat Koordinasi <p>11. Permasalahan : Belum terwujudnya koordinasi antara TPIN, TPID Provinsi, TPID Kab/Kota</p> <p>Sasaran : Terkendalinya Ekspektasi Inflasi</p> <p>Indikator : Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</p>

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>Rencana Aksi : Terselenggaranya Siaran Pers, Talk Show, Program Bandung Menjawab dan program lainnya dalam rangka membentuk persepsi positif masyarakat</p>
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting)	Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital dalam Penanganan Stunting	Prevalensi Stunting (Persentase Stunting)	<p>12. Permasalahan : Ketahanan Pangan belum optimal dan belum merata Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan Indikator : Ketahanan Pangan Skor pola pangan harapan Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian PMT bagi Balita gizi kurang Pemberian ASI Eksklusif kader bagi Bayi usia kurang dari 6 bulan Pemberian MP ASI bagi Anak usia 6-23 bulan Penyusunan kebijakan penurunan gizi buruk Pemberian PMT bagi Ibu Hamil KEK Pemberian TTD bagi ibu Hamil Pemberian TTD bagi Remaja Putri Pemberian TTD bagi Calon Pengantin/Calon Ibu Pemeriksaan Haemoglobin pada remaja putri penderita anemia Penyediaan bahan habis pakai (strip Hb, alcohol sw ab dan blood lancet) untuk skrining anemia pada remaja putri Pemberian Bantuan Pangan untuk 210 Keluarga Beresiko Stunting Sosialisasi Makan Benar Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) Penyusunan Peta Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Pemantauan Distribusi keberagaman pangan pokok sesuai kebutuhan <p>13. Permasalahan : Ketahanan Pangan belum optimal dan belum merata Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan Indikator : Skor pola pangan harapan Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan kepada perw akilan ibu-ibu PKK Pokja 3 Setiap Kecamatan Pemberian Bantuan Pangan Segar secara langsung kepada masyarakat (210 keluarga beresiko stunting) Pelaksanaan Operasi Pasar <p>d. Penumbuhan kelompok Buruan SAE di lokus Stunting</p>

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>e. Pemberian hasil panen dari kelompok buruan SAE kepada keluarga resiko stunting, posyandu dan masyarakat sekitar</p> <p>f. Pemberian Manfaat pekarangan bagi keluarga stunting</p> <p>g. Pemberian Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Program PKH dan BPNT)</p> <p>h. Pendampingan tentang kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah bagi PUS</p> <p>i. Pendampingan Calon Pengantin tentang pencegahan stunting</p> <p>j. Penyuluhan dan Pendampingan Keluarga berisiko stunting</p> <p>14. Permasalahan : Ketahanan Pangan belum optimal dan belum merata</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Akses terhadap makanan bergizi keluarga miskin dan rentan</p> <p>Indikator : Omset Usaha Keluarga Miskin dan Rentan</p> <p>Rencana Aksi :</p> <p>a. Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat Keluarga Miskin dan Rentan melalui pelatihan ketrampilan</p> <p>b. Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</p> <p>c. Pemberiajn bantuan tunai bersyarat bagi PUS miskin</p>



TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>15. Permasalahan : Belum Optimalnya pelaksanaan PHBS</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan PHBS</p> <p>Indikator : Jumlah Tatanan</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemantauan 8 Tatanan tentang Kaw asan Tanpa Rokok Pembinaan Masyarakat 10 indikator tentang PHBS Tatanan Rumah Tangga Sosialisasi Tentang Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), Pembinaan Bina Keluarga Balita Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Meningkatnya kualitas pangan siap saji Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Oleh Masyarakat (Gerakan Aksi Berzi, Cegah Stunting dan Aktifkan Posyandu) Sosialisasi dan pelatihan instruktur Senam Bandung Juara dalam rangka membudayakan OR Masyarakat Pemantauan Kaw asan Tanpa Rokok Penertiban Iklan Rokok (Pengampu Satpol PP) Penegakkan Reward and Punishment pelaksanaan KTR (Pengampu Satpol PP)



TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>16. Permasalahan : Belum Optimalnya Pelaksanaan PHBS</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan Berkeluarga</p> <p>Indikator : Kehamilan Remaja</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan PIK-R dan BKR Kelompok PIK Remaja dan BKR yang memberikan Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi remaja baik secara online maupun offline Edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja di kota bandung baik secara online maupun secara offline Penyuluhan KIE Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting melalui kegiatan Road Show Nonton Bareng Film Edukasi di sekolah-sekolah dan masyarakat. Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan/SSK Pendampingan tentang kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah bagi PUS Pendampingan Calon Pengantin tentang pencegahan stunting Penyuluhan dan Pendampingan Keluarga berisiko stunting <p>17. Permasalahan : Masih Rendahnya kualitas Kesehatan Lingkungan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Lingkungan Seha</p> <p>Indikator : Cakupan Rumah Sehat</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurn ulang dan Pemanfaatan Kembali Monev KK yang mendapat Pemicuan Pilar 1 STBM Monev Kelurahan yang melaksanakan stop BABS/ Open Defecation Free (ODF) Monev RT yang mendapat akses sanitasi (limbah domestik) Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga/ pemeriksaan laboratorium kualitas air minum Sosialisasi dan Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Setempat Visitasi Tempat Pengolahan Pangan dengan melakukan pemeriksaan fisik lingkungan dan pemeriksaan sampel makanan secara mikrobiolog Pemicuan STBM, Monev STBM dalam rangka Akses Sanitasi dasar yang layak dan aman Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga/ pemeriksaan laboratorium kualitas air minum Perbaikan Rumah tidak layakhuni

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>k. Pemantauan jentik di rumah/ bangunan yang ada di lingkungan Masyarakat</p> <p>l. Sosialisasi dan Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum</p> <p>m. Inspeksi dan Visitasi Tempat Fasilitas Umum dengan melakukan pemeriksaan fisik lingkungan</p> <p>n. Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/kota</p> <p>o. diseminasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja (materi fasilitasi pekerja diperusahaan untuk pekerja perempuan)</p> <p>18. Permasalahan : Masih rendahnya pemanfaatan akses pelayanan kesehatan Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan akses pelayanan kesehatan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Rencana Aksi :</p> <p>a. Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil sesuai standar</p> <p>b. Pelayanan Kesehatan bagi ibu bersalin sesuai standar</p> <p>c. Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin / PUS sesuai standar</p> <p>d. Pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu</p> <p>e. Pemeriksaan Haemoglobin pada remaja putri penderita anemia</p> <p>f. Pelayanan tatalaksana gizi buruk bagi balita gizi buruk</p> <p>g. Pemberian pelayanan kasus TBC pada Balita terstandar di Puskesmas</p> <p>h. Pemberian Imunisasi bagi Balita</p> <p>i. Pelayanan Kasus Diare pada Balita terstandar</p> <p>j. Pelayanan Kasus ISPA pada Balita terstandar</p> <p>k. Pelayanan pencegahan Kasus Kecacingan terstandar</p> <p>l. Pelayanan Kasus TBC Pada Ibu Hamil terstandar</p> <p>m. Pelayanan kasus hipertensi pada Ibu hamil sesuai standar</p> <p>19. Permasalahan : Masih rendahnya pemanfaatan akses pelayanan kesehatan Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan akses pelayanan kesehatan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesehatan</p>



TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>Rencana Aksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan deteksi dini dan penanganan gangguan mental pada Ibu hamil b. Pembinaan Faskes dalam Pelayanan KIA terstandar c. Pembinaan Faskes yang memberikan penanganan Penyakit agar sesuai standar d. Pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar bagi Bayi baru lahir e. Pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar Bagi Balita f. Pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ibu hamil g. Pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ibu bersalin h. Terbinanya Faskes tentang pelayanan kesehatan keluarga terpadu i. Pembinaan Puskesmas untuk meningkatkan penanganan penyakit berdampak pada stunting (Diare & TB) sesuai standard j. Pembinaan Faskes dalam memberikan pelayanan KB sesuai standar k. Pemenuhan Tenaga Gizi yang kompeten di setiap Faskes l. Pelatihan tim tatalaksana gizi Faskes m. Pembinaan Tenaga Kesehatan Pemberi Pelayanan Gizi

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>20. Permasalahan : Masih rendahnya pemanfaatan akses pelayanan kesehatan</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana Keluarga Berisiko Stunting mempunyai jaminan Kesehatan Meningkatnya Administrasi Kependudukan <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kehamilan Yang tidak diinginkan (unmet need) Jaminan Kesehatan masyarakat miskin Persentase <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kehamilan Yang tidak diinginkan (unmet need) <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pembinaan Faskes tentang pelayanan KB Penyediaan Alokasi di Fasilitas Kesehatan Penggerakan edukasi dan fasilitasi terkait kesertaan akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Fasilitasi Pelayanan PUS untuk ber KB Jaminan Kesehatan masyarakat miskin <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan data jaminan sosial Kesehatan bagi w arga miskin dan rentan Pendaftaran Masyarakat Miskin yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan menjadi peserta JKN (BPJS PD PEMDA) PUS miskin penerima bantuan PBI Terselenggaranya pendampingan sosial bagi keluarga miskin dan rentan Pengelolaan Jaminan Pelayanan kesehatan Masyarakat



TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>c. Persentase</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan melalui berbagai media seperti tatap muka ke kew ilayahan, melalui media elektronik, media cetak, maupun media sosial • Penyelenggaraan Pelayanan adminduk dengan metode jemput bola melalui program Mepeling dan Bi Eha dan Mang Udin. • Penyelenggaraan Pelayanan adminduk dengan metode jemput bola melalui program Mepeling dan KISANAK • Terselenggaranya Pelayanan adminduk dengan metode jemput bola melalui program Mepeling Akta Kelahiran dan Kerjasama dengan IBI dan Rumah Sakit • Terselenggaranya Kegiatan Pencatatan Perkawinan Massal bagi Penduduk Non Muslim bekerjasama dengan FOKTI MP • Pendataan Keluarga <p>21. Permasalahan : Rendahnya Kualitas Database</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas database terkait stunting (ANSIT) berdasarkan PERPRES 72 tahun 2021 (dalam kurung 29 indikator) melalui aplikasi E Penting</p> <p>Indikator : Persentase Akurasi Data Stunting</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya SDM Pengelola atau Pengguna Data Terkait Stunting Berdasarkan Kelompok Sasaran b. Terlaksananya pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data pada Puskesmas c. Terlaksananya pemetaan kebutuhan SDM Pengelola Data pada Kelurahan d. Terlaksananya Pelatihan SDM Pengelola Data Melalui Aplikasi E-Penting terintegrasi berdasarkan kelompok sasaran e. Tersedianya Data Terkait Stunting Yang akurat f. Terlaksananya Pemetaan Kebutuhan Data Terkait Stunting yang bersumber dari beberapa Aplikasi yang tersedia g. Terlaksananya Pengumpulan Data Terkait Stunting Melalui Aplikasi E-Penting Terintegrasi h. Tersedianya Laporan Monev Data secara berkala i. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi progres input data bedasarkan kelompok sasaran j. Terlaksananya koordinasi Monitoring dan evaluasi Progres Input Data Lintas Sektor (kelompok sasaran) k. Terlaksananya Pemutkhiran/input data terkait stunting perharari/bulan/tahun (kelompok sasaran)

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>22. Permasalahan : Belum Optimalnya Aksesibilitas Aplikasi E-Penting terintegrasi</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas Aplikasi E-penting Terintegrasi</p> <p>Indikator : Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Peningkatan Stunting</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya SDM Pengelola Aplikasi E-Penting Tersedianya Pemetaan Pengguna Aplikasi E-Penting Terlaksananya Koordinasi antara pihak pengguna Aplikasi E-Penting (Pengampu TPPS) Tersedianya Akses internet yang mudah Terlaksananya Survey Pemetaan Blank Spot Internet (Pengampu DISKOMINFO) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung internet Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progres Input Data Lintas Sektor (Kelompok Sasaran) penyusunan panduan/informasi penggunaan aplikasi EPenting Penyusunan Pedoman Penggunaan Aplikasi EPenting Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Penting <p>23. Permasalahan : Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Pendukung E Penting</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pendukung Aplikasi EPenting</p> <p>Indikator : Persentase SDM Kompeten Pengelola database dan sistem informasi stunting</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya SDM IT yang memiliki sertifikasi kompetensi Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan SDM IT Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan IT Terlaksananya Uji Kompetensi Tersedianya Perangkat Pendukung Aplikasi EPenting yang Berkualitas Pelaksanaan Pemetaan Perangkat Pendukung Terlaksananya Pengadaan Perangkat Pendukung Tersedianya Aplikasi EPenting yang aman Pelaksanaan Uji Ketahanan Aplikasi E-Penting (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Penetrasi Testing) Terlaksananya Mitigasi Risiko Aplikasi E-Penting



TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	<p>1. Permasalahan : SDM Tata Kelola Pengadaan yang Belum Kompeten</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Pelaku PBJ yang Kompeten</p> <p>Indikator : Jumlah SDM Pelaku PBJ yang Tersertifikasi</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan kepada Pelaku PBJ Melakukan Sertifikasi kepada Pelaku PBJ yang Sudah Diberikan Pelatihan <p>2. Permasalahan : Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang Belum Optimal dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Indikator : Tingkat Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE dan P3DN SIPD</p> <p>Rencana Aksi : Mengumumkan Seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai pagu Pengadaan pada SiRUP</p>

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>3. Permasalahan : Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang Belum Optimal dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Indikator : Tingkat Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE dan P3DN SIPD</p> <p>Rencana Aksi : Melaksanakan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem pada Aplikasi P3DN SIPD</p> <p>4. Permasalahan : Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang Belum Optimal dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Indikator : Tingkat Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE dan P3DN SIPD</p> <p>Rencana Aksi : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi realisasi TKDN/PDN</p>



TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>5. Permasalahan : Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang Belum Optimal dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Indikator : Tingkat Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE dan P3DN SIPD</p> <p>Rencana Aksi : Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e-Tendering</p> <p>6. Permasalahan : Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang Belum Optimal dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Indikator : Tingkat Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE dan P3DN SIPD</p> <p>Rencana Aksi : Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket e-Purchasing pada Katalog Elektronik</p> <p>7. Permasalahan : Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang Belum Optimal dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Indikator : Tingkat Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE dan P3DN SIPD</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Evaluasi Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket Non-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE b. Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket Transaksional pada E-Kontrak dalam SPSE c. Melaksanakan Evaluasi Kepatuhan PD dalam Pencatatan Seluruh Paket Pekerjaan pada SPSE <p>8. Permasalahan : Proses sertifikasi yang sulit</p> <p>Sasaran : Terwujudnya Iklim perijinan pelaku usaha lokal yang mudah dan ramah pelaku usaha</p>



TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil sesuai SLA 14 hari kerja b. Sertifikasi TKDN bagi Industri Menengah sesuai SLA 45 hari kerja <p>Rencana Aksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan proses sertifikasi TKDN bagi Pelaku Usaha Industri Kecil lokal sesuai SLA 14 hari kerja b. Melaksanakan proses sertifikasi TKDN bagi Pelaku Usaha Industri Menengah lokal sesuai SLA 45 hari kerja <p>9. Permasalahan : Pelaku Usaha yang Belum Memahami terkait Proses Pengadaan secara Elektronik</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait Proses Pengadaan secara Elektronik</p> <p>Indikator : Jumlah pelaku usaha yang paham dengan proses pengadaan secara elektronik</p> <p>Rencana Aksi : Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Koperasi, Pelaku Usaha dan UMKM lokal terkait Proses Pengadaan Secara Elektronik</p>

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>10. Permasalahan : Pelaku Pengadaan belum mencantumkan TKDN dalam dokumen kontrak Sasaran : Meningkatnya pencantuman TKDN dalam dokumen kontrak oleh Pelaku Pengadaan Indikator : Jumlah kontrak yang mencantumkan TKDN Rencana Aksi : Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pencantuman TKDN dalam Kontrak dengan Pelaku Pengadaan</p> <p>11. Permasalahan : Jumlah barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia Sasaran : Meningkatnya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan Indikator : Persentase barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi Rencana Aksi : Melaksanakan business matching antara DIS-DAGIN, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia)</p> <p>12. Permasalahan : Belum adanya kebijakan pemberian preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran : Meningkatnya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan Indikator : Persentase barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi Rencana Aksi : Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Permasalahan : Belum adanya informasi transaksi penggunaan e-katalog secara komprehensif Sasaran : Meningkatnya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan Indikator : Persentase barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi</p>

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	RENCANA AKSI
			<p>Rencana Aksi : Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan e-katalog terkait harga (telah mencantumkan biaya tambahan seperti biaya kirim, biaya instalasi, dll) dan aktifitas penyedia (aktif atau tidak, bagaimana ratingnya, dll)</p> <p>14. Permasalahan : Belum optimalnya pelaksanaan penilaian penyedia oleh pengguna e-katalog</p> <p>Sasaran : Meningkatnya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan</p> <p>Indikator : Persentase barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi</p> <p>Rencana Aksi : Melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian penyedia oleh penggunaan e-katalog</p> <p>15. Permasalahan : Spesifikasi barang yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh penyedia dalam negeri</p> <p>Sasaran : Menurunnya Belanja Produk Impor dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Indikator : Persentase Belanja Produk Impor pada RUP terpenuhi</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Kebijakan Pengendalian Penggunaan Produk Impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Melaksanakan Sosialisasi kebijakan Pengendalian penggunaan barang impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengendalian penggunaan produk impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah <p>16. Permasalahan : Masih rendahnya kepatuhan melaksanakan RUP sesuai pencatatan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kepatuhan dalam Penggunaan PDN/UMKM</p> <p>Indikator : Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Penggunaan PDN/UMKM</p> <p>Rencana Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan revisi pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Bandung Melaksanakan Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



E. PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Persentase	100
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Persentase	86,6
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Nilai	3,35
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*		3
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	N/A
	Nilai SAKIP:		
	Perencanaan Kinerja	Nilai	23,42
	Pengukuran Kinerja	Nilai	24,48
	Pelaporan Kinerja	Nilai	11,95
	Evaluasi Internal	Nilai	86,00

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	Layanan	95
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Perangkat Daerah	Penambahan 1 PD peringkat WBK dan 1 PD Peringkat WBBM
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level	SPIP Terintegrasi (MR, IEPK, PK APIP)
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Persentase	87%
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	76
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	C (50-64,99)
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	N/A
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	62.50
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Level	3,90
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	78,7
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	80%
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Nilai	50,19
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Nilai	70,8
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Nilai	100
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai	369
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	Nilai	62,9
	Employeer Branding*		7,5
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	85
	Indeks Pelayanan Publik		4,62

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target Tahunan 2023	Leading Sector
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)	4,23	Bappelitbang (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	7,25 Triliun	DPMPSTP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	4,5%	Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting (Persentase Stunting)	17,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	35%	Disdagin, Bagian Ekonomi, Bagian PBJ (Tim P3DN)

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.



F. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2023 dapat tercapai melalui Rencana Aksi terhadap 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama dan 26 (dua puluh enam) Indikator, karena dapat memberikan dampak positif yang dirasakan oleh publik/ masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada 4 Perangkat Daerah (DSDABM, Disciptabintar, DPKP dan DLH) serta 2 RSUD (RSUD Kota Bandung dan RSUD Bandung Kiwari) Melakukan Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi terhadap : <ol style="list-style-type: none"> Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO); Evaluasi Kelembagaan
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Pembentukan Tim Kerja pada Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan kinerja, kebutuhan dan beban kerja unit organisasi dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Verifikasi yang berdasarkan Keputusan Wali Kota No. 800/Kep.603-ORG/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Tim Verifikasi Pembentukan Tim Kerja Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung



KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Telah dilakukannya sosialisasi penilaian SPBE ke76 Perangkat Daerah : 1. Tanggal 27 maret Persiapan Dokumentasi Monev 2. Tanggal 29 maret Bimtek E-Monev SPBE 3. Tanggal 5 April Bimtek Peta Rencana 4. Tanggal 6 April Bimtek Bandung Sadayana 5. Tanggal 11 April Bimtek Manajemen Resiko 6. Tanggal 14 april Batas Akhir Pengumpulan Evidence E-monev SPBE 7. Tanggal 17 April Publis hasil Nilai SPBE sementara Perangkat Daerah 8. Tanggal 2 Mei Persiapan Verifikasi Tahap 2 e-monev SPBE 9. Tanggal 3 Mei Persiapan Dokumentasi Audit SPBE 10. Tanggal 3 Mei Pembahasan Draf Perwal SPBE 11. Tanggal 8-19 Mei Bimtek Audit SPBE 12. Tanggal 15 Mei Bimtek SPLP 13. Tanggal 22-26 Mei Tindak lanjut hasil Audit 14. Tanggal 29-31 Mei Expose SPBE.
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	Telah terbit Perwal dan Kepwal Baru : 1. Perwal Nomor 20 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE Kota Bandung 2. Kepwal Arsitektur SPBE Kota Bandung Tahun 2023
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Berdasarkan SE Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN), bahwa pengukuran IPPN hanya dilakukan s.d Tk. Provinsi belum terhadap Kabupaten/Kota
	Nilai SAKIP:	
	Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	1. Telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 pada tanggal 30 Maret 2023 2. Telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 3. Telah dilakukan asistensi dan pendampingan dalam rangka perbaikan sasaran dan indikator kinerja DP3A dan Dishub dengan hasil berupa Renstra hasil reuiu untuk DP3A dan Dishub serta PK perubahannya. 4. Telah dilaksanakan asistensi pengukuran keselarasan rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dengan BA hasil pengukuran sebagaimana terlampir



KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
		<ol style="list-style-type: none">Bersama-sama dengan Bagian Organisasi telah disusun Kepwal Nomor 061/ Kep.3067-Bagor/2022 tentang Tim Penilai Rapor Kinerja Perangkat Daerah yang mengatur tentang penunjukkan Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah beserta tugasnya. Telah dilakukan pengembangan menu penilaian kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi E-SAKIP.Upgrade Integrasi Sistem E-SAKIP dan Mangbagja masih terus dilakukan dan masih membutuhkan waktu s.d TW 4 tahun 2023. (Optimalisasi integrasi data program, kegiatan dan sub kegiatan untuk diterapkan pada tahun 2024). untuk menyempurnakan aplikasi E-SAKIP dilakukan juga integrasi dengan SIPD (menarik data rencana dan realisasi anggaran per Perangkat daerah) sebagaimana laporan Namun dengan aplikasi SIMDA belum dapat diintegrasikan dikarenakan belum ada petunjuk dari BPKP-RITelah dilakukan penyusunan kajian yang didasarkan pada isu strategis, fenomena terkini serta permasalahan pada Pemerintah Kota Bandung dan telah dilaksanakan setiap tahun.
	Pelaporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan Asistensi LKIP Perangkat DaerahMelaksanakan Verifikasi LKIP Perangkat Daerah
	Evaluasi Internal	<ol style="list-style-type: none">Telah dilaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tanggal 15 Mei – 13 Juni 2023 dan 19 – 23 Juni 2023, sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bandung Nomor: PW.02.01/1753-INSPEKTORAT/2023 tanggal 2 Mei 2023 dan Nomor: PW/2365-INSPEKTORAT/2023 tanggal 16 Juni 2023Telah tersusun LHE AKIP untuk setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota BandungTelah dilakukan konsultasi ke Kementerian PAN-RB terkait AKIP pada tanggal 29 Mei 2023, sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bandung Nomor: RT.01.01/2078-INSPEKTORAT/2023 tanggal 25 Mei 2023



KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
		4. Telah dilakukan rapat penyusunan Draft Kepwal Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah dan pembahasan pembuatan aplikasi Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah pada tanggal 28 Juli 2023 dan 16 Agustus 2023, sesuai dengan Surat Undangan Inspektur Daerah Kota Bandung Nomor: B/PW.02.01/2944-INSPEKTORAT/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dan Nomor: PW.02.01/3288-INSPEKTORAT/2023 tanggal 14 Agustus 2023
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi pelayanan MPP Kota Bandung untuk menginvestarisasi pelayanan publik yang dapat diselenggarakan secara digital, yang dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 7 September 2023. Dengan hasil sebanyak 38 pelayanan dari 11 Instansi penyelenggara pelayanan di MPP Kota Bandung
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Sehubungan dengan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung beberapa kegiatan mandatory tidak dapat dilanjutkan untuk Tahun Anggaran 2023.

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
		<p>Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah pada Bab IV Penutup menyatakan bahwa "Instansi pemerintah harus memahami bahwa upayanya untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan integritas di lingkungannya akan berpengaruh tidak hanya pada kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan, namun juga akan meningkatkan kepercayaan publik yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, apabila pada tahun pengajuan terdapat perbuatan melanggar hukum terkait KKN pada suatu instansi, khususnya yang melibatkan pimpinan tertinggi instansi, maka usulan TPI yang telah disampaikan pada TPN akan digururkan".</p>
<p>Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)</p>	<p>Tingkat Maturitas SPIP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi bagi APIP Daerah pada tanggal 17 – 20 Januari 2023 bertempat di Hotel Savoy Homan Bandung, sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bandung Nomor: KP.09/127-INSPEKTORAT/2023 tanggal 10 Januari 2023 2. Telah dilakukan persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 23 – 28 Februari 2023 sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bandung Nomor: PW.02.01/355-INSPEKTORAT/2023 tanggal 20 Januari 2023 3. Telah dilakukan rapat pembahasan pelaksanaan PM dan PK Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kota Bandung Tahun 2023 pada tanggal 1 Maret 2023 sesuai dengan Surat Undangan Nomor: TU.04/326-Asdum/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bandung Nomor: PW.02.01/1014-INSPEKTORAT/2023 4. Telah dilakukan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Grand Hotel Preanger Bandung, sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Daerah Nomor: P/PD.03.01.01.02/953-Asdum/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 hal Sosialisasi SPIP Terintegrasi



KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Telah dilakukan pengusulan Admin Aplikasi SPIP Pemerintah Kota Bandung kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor: S/TU.01.02/1050-INSPEKTORAT/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 hal Permohonan Admin Aplikasi SPIP pada Pemerintah Kota Bandung 6. Telah dibuat Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor: 046-Setda/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023 Tingkat Perangkat Daerah 7. Telah diusulkan rancangan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung melalui Surat Nomor: B/HK.02.03/1154-INSPEKTORAT/IV/2023 tanggal 13 Maret 2023 8. Telah dibuat Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor: S/PW.06.02/1783-INSPEKTORAT/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 hal Rekomendasi Perbaikan Hasil Penilaian Cepat SPIP Terintegrasi Tahun 2022

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbit nya Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 239-Diskominfo 2023 tentang Tim Pengelola LAPOR tahun 2023 2. Terlaksananya sosialisasi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! di wilayah Kota Bandung secara daring, pada hari Selasa 16 Mei 2023. Link Berita: https://www.bandung.go.id/news/read/8012/pemkot-bandung-berkomitmen-tingkatkan-pelayanan-keterbukaan-informasi 3. Dilakukannya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SP4N-LAPOR melalui aplikasi eMonev PPID sebagai aplikasi Monev PPID dan LAPOR pertama di Indonesia
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dibuat Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Bandung Nomor: PW.07/1408-INSPEKTORAT/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Tim Pencegahan Korupsi dan Survei Penilaian Integritas Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2023 2. Telah dibuat Formulir Kepesertaan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2023 Nomor: B/PW.05/1260-INSPEKTORAT/IV/2023 tanggal 17 April 2023





KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Telah dibuat Surat Permintaan Data populasi e-SPI melalui Surat Inspektur Daerah Kota Bandung Nomor: B/TU.01.02/1797-INSPEKTORAT/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 hal Permintaan Data Populasi e-SPI 4. Telah dibuat Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor: 076-INSPEKTORAT/2023 tanggal 15 Mei 2023 hal Penyebaran dan Sosialisasi Penggunaan QR-code SPI
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Telah dilakukan penyusunan kajian yang didasarkan pada isu strategis, fenomena terkini serta permasalahan pada Pemerintah Kota Bandung dan telah dilaksanakan setiap tahun
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi/Konsultasi dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat tentang Indeks Reformasi Hukum 2. Penyampaian nama-nama PIC IRH Sekretariat Daerah Kota Bandung ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2023 3. Penyiapan eviden penilaian di dalam website http://irh.kemenkumham.go.id 4. Upload eviden penilaian Mandiri (Self Assessment oleh tim asecor)
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Pemanfaatan pengelolaan aplikasi kearsipan Dinamis <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek SRIKANDI 2. Pemanfaatan Pengelolaan Aplikasi Kearsipan Statis (Alih Media Arsip dan SIKN)



KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Dokumen manajemen pengelolaan data statistik sektoral yang terstandar dan terintegrasi (progres penyelesaian 50%). 2. Telah dilakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada 3 dinas yaitu DP3A, Bappelitbang dan Diskominfo sebagai bahan penilaian EPSS tahun 2023.
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan RUP di TW I Untuk Seluruh Perangkat Daerah (TWII) 2. Bimbingan Peningkatan Kompetensi Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa, Bimtek Pemilihan Penyedia dan Evaluasi TKDN Konstruksi (TWII) 3. Sosialisasi TKDN Jasa Konstruksi Kepada PD
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sensus/inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai SE Wali Kota Bandung No 077-BKAD/2023 tanggal 15 Mei 2023 2. Sosialisasi pelaksanaan Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah tanggal 24 – 30 Mei 2023. 3. Penyusunan Laporan Keuangan dan Prognosis Pemerintah Kota Bandung Semester I Tahun 2023

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan Pendampingan Perangkat Daerah (Consulting Partner) dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 5 – 18 Juni 2023, sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bandung Nomor: PW.02.01/2272-INSPEKTORAT/2023 tanggal 9 Juni 2023 2. Telah dilakukan input data TLHP BPK melalui aplikasi e-Auditee BPK RI 3. Sedang disusun Laporan Hasil Pendampingan Perangkat Daerah atas TLHP BPK RI Tahun Anggaran 2022
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penyusunan Profil Jabatan Fungsional 2. Proses Penilaian Kompetensi dalam Jabatan Fungsional 3. Sedang berlangsung Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN dalam Jabatan Fungsional
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Proses Penilaian pada Layanan Assessment Centre
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penerapan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 pada Sistem Mang Bagja 2. Proses Penilaian Kinerja Periodik Pegawai sesuai Formulasi Penilaian Kinerja yang berlaku 3. Proses Penyusunan Laporan penilaian Kinerja Pegawai pada seluruh Perangkat Daerah setiap bulan
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pengadaan CASN (PPPK) 2. Proses penyusunan talent pool 3. Proses pelaksanaan Strategi penyelesaian atas permasalahan kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi 4. Proses Pembangunan sistem penilaian kompetensi melalui sistem penilaian kompetensi pegawai/ assessment center
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak* Employeeer Branding*	Proses pelaksanaan pelatihan Core Values ASN melalui Bandung Learning Center (BLC) untuk seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan SKM setiap semester, sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, bahwa survei dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali. 2. Melakukan upaya penyeragaman metode survey melalui 9 Unsur Pelayanan berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017; 3. Pengumpulan data SKM melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id)

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	PROGRESS
	Indeks Pelayanan Publik	Pendampingan Penilaian Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Tahun 2023 kepada Unit Pelayanan Publik yang terdiri : 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Sosial 5. Dinas Kependidikan 6. Puskesmas Padasuka 7. Puskesmas Salam

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.

G. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023, semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk membantu dalam melakukan tahapan proses pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro yang meliputi :

1. Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi setelah penajaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut di level mikro, terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi General, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal.

2. Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program-kegiatan yang sifatnya problem solving-debottlenecking dalam tata kelola pemerintah.

Bentuk inovasi dan inisiatif dalam pelaksanaan proses pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro dengan menggunakan instrumen, metode dan teknik yang berbeda diperkenankan selama masih sejalan untuk mengakselerasi percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja

prioritas pembangunan, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional.

Melalui penyusunan Rencana Kerja, Perangkat Daerah didorong untuk mampu menyusun dan mendesain seluruh tahapan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sejalan dengan agenda prioritas nasional dan mandat institusi, sekaligus memberi ruang inisiatif serta inovasi yang sesuai dengan kebutuhan publik.

Perangkat Daerah diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergitas agar Reformasi Birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi. Pada akhirnya, pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing, serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tangkas, tanggap, tepat, profesional, dan bersih dari praktik KKN.





PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

